

# PENGEMBANGAN PENDIDIKAN EKONOMI BERKELANJUTAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS

Wahjoedi, Gatot Sujono, Nunung Nurastuti,  
Endang Sri Handayani, Magistyo Purboyo Priambodo

Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang  
e-mail: w703di@yahoo.com

**Abstract: The Development of Sustainable Economics Education for Senior High Schools.** The focus of this first-year research of a multi-year study is portraying the implementation of economics education at senior high schools in East Java. Employing a survey design, this study involved 69 economics teachers. Interviews and questionnaires were utilized to obtain data concerning whether the practice of economics teaching reflects sustainable education. Existing relevant documents were also examined to provide supporting evidence. The findings show that sustainable economics education is not evident yet in the teachers' teaching practice as can also be seen from the curriculum, teachers' subject-matter understanding, teaching and learning processes, textbooks, and school atmosphere. These findings then become the basis for developing a model of sustainable economics education.

**Keywords:** sustainable economics education, senior high schools

**Abstrak: Pengembangan Pendidikan Ekonomi Berkelanjutan untuk Sekolah Menengah Atas.** Tujuan penelitian tahap pertama dari penelitian multi tahun ini adalah untuk mendeskripsikan tentang potret pelaksanaan pembelajaran ekonomi berkelanjutan di SMA Jawa Timur. Melalui penelitian survai, data dikumpulkan dari 69 orang guru ekonomi SMA dengan cara wawancara dan penyebaran angket serta dukungan data dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan ekonomi berkelanjutan di SMA belum terlaksana. Belum terlaksananya hal tersebut tercermin pada muatan isi kurikulum, pemahaman dan kesiapan guru, inovasi proses pembelajaran, kondisi buku ajar, dan penataan suasana sekolah. Melihat kondisi tersebut diperlukan langkah perbaikan dengan segera melalui pengembangan pendidikan ekonomi berkelanjutan dengan pembelajaran yang lebih inovatif.

**Kata kunci:** pendidikan ekonomi berkelanjutan, Sekolah Menengah Atas

Dewasa ini, hampir semua orang menyadari, mengalami dan merasakan semakin cepatnya tingkat degradasi lingkungan (Soerjani, 2000: 28). Dalam skala global, berbagai bentuk kerusakan lingkungan tersebut, antara lain adalah kepunahan spesies flora dan fauna, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global (*global warming*). Semua persoalan lingkungan hidup tersebut diakui disebabkan oleh perilaku ekonomi manusia, terutama dalam kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Sudah beberapa dekade terakhir ini, orang dihadapkan pada persoalan degradasi kualitas lingkungan hidup yang kian rumit dan mengerikan. Hingga dekade tahun 1950-an, persoalan lingkungan hidup masih bersifat lokal. Artinya, kerusakan lingkungan hanyalah terjadi dan dirasakan dampak buruknya

oleh masyarakat setempat. Kemudian, hanya dalam kurun waktu 20 tahun saja, yakni pada dasa warsa 1970-an persoalan kerusakan lingkungan telah berubah menjadi isu regional yang selanjutnya menjelma sebagai tantangan global yang terpaksa harus dihadapi oleh setiap insan di seluruh penjuru dunia. Berikut ini beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup yang menonjol.

*Pertama*, kepunahan beberapa spesies flora dan fauna (*the species extinction*). Persoalan lingkungan hidup yang menonjol dewasa ini adalah aktivitas manusia ternyata menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Misalnya, hanya sejumlah 8 jenis mamalia dan 24 jenis burung yang punah pada abad 18, namun pada abad 19 telah meningkat menjadi 29 jenis mamalia dan 61 jenis burung yang lenyap dari muka

bumi. Sementara itu, para ahli mencatat bahwa dalam kurun waktu kurang dari satu abad, yakni dari tahun 1900 sampai dengan 1987 sebanyak 52 jenis mamalia dan 70 jenis burung telah mengalami kepunahan (Pugel & Lindert, 2000: 254). Sebagai gambaran lain, harimau China Selatan (*panthera tigris amoyensis*) sekarang hanya tinggal 20 ekor saja, sementara harimau Bali telah punah sekitar tahun 1930-an, harimau Kaspia tahun 1960-an, dan harimau Jawa tahun 1980-an (Kompas, 13 Februari 2010). Aktivitas produksi, konsumsi dan perburuan telah menimbulkan kerusakan habitat, memunculkan predator baru, dan polusi yang mengakibatkan berbagai jenis makhluk hidup baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan mengalami penyusutan populasinya atau bahkan punah. Jelas kiranya, kepunahan beberapa spesies makhluk hidup ini telah menutup kemungkinan orang untuk mengetahui manfaatnya bagi kehidupan sekarang dan yang datang.

Para ahli berpendapat bahwa lautan, tumbuh-tumbuhan, mineral, ikan, kerang-kerangan dan makhluk hidup lainnya yang berada di lautan tersebut merupakan salah satu sumber daya global yang terbesar. Namun, persoalan besar telah dan akan muncul di kemudian hari. Mengapa demikian? Karena di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ternyata tidak satu pihakpun yang memiliki hak atas laut dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ketika sebagian besar lautan tidak bertuan atau dengan kata lain adalah milik bersama, maka siapapun mempunyai hak dan kesempatan untuk mengeksploitasi laut bebas. Akibatnya, banyak pihak yang terdorong untuk menangkap ikan sebanyak mungkin yang dapat mereka lakukan, tanpa mempedulikan apakah populasi ikan semakin turun menuju titik kritis atau bahkan mengalami kepunahan. Dalam teori ekonomi, situasi seperti ini disebut sebagai *tragedy of the commons* (Field, 1997: 73).

Berdasarkan penelitian mutakhir, diperoleh data bahwa seperempat dari 200 jenis ikan laut yang utama telah mengalami penurunan stoknya, bahkan dikhawatirkan mengalami kepunahan jika tidak diambil langkah-langkah pencegahan atau program konservasi yang konkret. Kalau memang demikian, siapakah yang bertanggungjawab? Ketika lautan dan isinya adalah untuk kepentingan seluruh makhluk yang hidup di planet bumi ini, maka sudah barang tentu pihak yang bertanggungjawab atas kelestariannya adalah umat manusia semuanya. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui komitmen politik, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum (Djajadiningrat dkk., 2011: 230)

*Kedua*, penipisan lapisan ozon (*the depletion of ozon layers*). Pada dasawarsa 1940-an, telah dikembangkan berbagai teknologi berbasis pada penggunaan *chlorofluorocarbon* (CFCs). Dari seluruh CFCs yang diproduksi antara lain sekitar 30% digunakan pada produk lemari pendingin (*refrigerator*), *air conditioner* (AC), dan *heat pumps*, sementara 28% pada *foam blowing*, sekitar 27% untuk *aerosol propellant*, dan sisanya yakni sebesar 15% bagi industri pembersih (*cleaning industries*). Namun, pada awal dekade 1970-an, serangkaian penelitian telah membuktikan bahwa CFCs dan *gas halons* yang digunakan pada alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*) yang secara langsung memang tidak meracuni manusia, ternyata menipiskan lapisan ozon di atas atmosfer. Bahkan, berdasarkan hasil pengamatan pada tahun 1985 ditemukan bukti bahwa pada *stratosphere* di atas Kutub Utara dan Selatan lapisan ozon telah berlubang-lubang (Pugel & Lindert, 2000: 256). Kondisi ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang hidup di atas bumi. Mengapa demikian? Lapisan ozon pada *stratosphere* adalah penting sebagai penyerap sinar ultra-violet dari sinar matahari yang masuk ke bumi. Perlu diketahui bahwa sinar ultra-violet akan menimbulkan kanker-kulit, mengurangi produktivitas tanaman, dan menyebabkan perubahan iklim.

Menyadari besarnya dampak buruk penipisan dan bisa juga pelubangan lapisan ozon terhadap kelangsungan hidup makhluk di planet bumi, sebagian besar negara dunia telah bersepakat menandatangani perjanjian, *The Montreal Protokol*, untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Program bersama yang dilakukan adalah mereka melarang melakukan ekspor-impor CFCs dan gas halon, serta usaha menggantikannya dengan bahan kimiawi lainnya yang ramah lingkungan (Wardhana, 2010: 71). Usaha ini telah menunjukkan hasilnya. Pada tahun 1992, telah dilakukan pengamatan, ternyata terjadi penurunan kadar gas CFCs dalam atmosfer lebih dari 50%. Namun hal ini bukan berarti telah berakhirnya ancaman sinar violet menimpa bumi. Mengapa demikian? *Pertama*, lapisan ozon yang terlanjur berlubang akan menutup kembali dalam jangka panjang, diperkirakan sampai akhir abad 21. *Kedua*, beberapa negara, terutama negara berkembang, secara diam-diam masih tetap menggunakan CFCs dalam industri mereka karena dianggap ongkosnya lebih murah. Oleh karena itu, sekali lagi persoalan penipisan lapisan ozon masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

*Ketiga*, pemanasan global (*global warming*). Dewasa ini, kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian utama adalah masalah semakin meningkat-

nya suhu global (Salim, 2010: 13). Proses pemanasan global ini terjadi tidak lain karena aktivitas manusia, seperti pembakaran minyak bumi untuk berbagai jenis kendaraan bermotor dan kegiatan industri, juga pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan pertanian yang menimbulkan akumulasi konsentrasi gas asam arang (*Carbon dioxide*, CO<sub>2</sub>) pada lapisan atmosfer bumi melalui efek rumah kaca (*the green house effect*). Sebagai contoh, dalam hal penggunaan batubara sebagai sumber energi, India memberikan kontribusi 5% dari seluruh emisi CO<sub>2</sub> dunia. Sementara itu, sebesar 60% dari total emisi gas efek rumah kaca dunia disebabkan oleh aktivitas produksi dan konsumsi negara-negara industri maju. Pemanasan global telah mengakibatkan, antara lain pembentukan gurun pasir (*desertification*) yang cepat dan semakin meluas, bencana banjir pada kota-kota pantai (*coastal cities*) dan berbagai lahan pertanian ketika gunung es di kutub bumi mencair, dan kekeringan di beberapa bagian dunia, yang sering menimbulkan kebakaran menyebabkan timbulnya gas CO<sub>2</sub>.

Kelompok negara maju (*industrialized countries*) menuding masyarakat negara berkembang (*developing countries*) dan negara miskin (*poor countries*) menjadi biang keladinya, karena dengan “sembrono” berburu binatang dan menebang atau membakar hutan untuk pembukaan lahan pertanian. Sebaliknya, negara berkembang dan miskin menuding negara majulah yang serakah mengeksploitasi tambang dan hutan untuk kepentingan produksi dan konsumsi yang boros. Kini perdebatan itu mulai ditinggalkan karena dianggap bukan merupakan pemecahan masalah. Sebaliknya, muncul gerakan kesadaran dunia untuk mengatasinya secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam delapan agenda *Millennium Development Goals (MDGs)* yang ditetapkan disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (Sulistyo dkk., 2010: xiv).

Deklarasi Milenium yang berisi Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals, MDGs*), terdiri dari delapan agenda yaitu mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, pendidikan universal, kesetaraan gender, kesehatan anak, kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS, kelestarian lingkungan, dan kemitraan global. Jika disimak, sesungguhnya ke-8 agenda ini saling mengait dan mendukung satu sama lain. Sebagai ilustrasi, peningkatan kualitas pendidikan akan mengurangi kemiskinan sehingga akan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam mengeksploitasi hutan dan tambang secara sembarangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika *MDGs* ini memiliki gaung yang begitu kuat menerobos batas-batas wilayah kekuasaan negara. Semuanya bergerak berusaha mencapai sasaran tersebut.

Semua negara telah bergerak dalam berbagai program, salah satunya melalui pendidikan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, banyak negara menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas pertama dalam mewujudkan MDGs, termasuk pendidikan ekonomi berkarakter wawasan lingkungan. Sebagai bukti adalah banyak negara terutama negara maju telah memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (Energy Saving Trust, 2007: 4).

Sementara itu, ternyata kondisi di Indonesia dapat dinilai dan terbukti belum secara intensif dapat mewujudkan implementasi pendidikan berkelanjutan, baik secara monolitik maupun terintegratif ke dalam semua bidang pendidikan termasuk ke dalam pendidikan ekonomi pada beberapa jenjang pendidikan. Melihat realita ini, peneliti telah melakukan kajian terhadap kemungkinan memasukkan wawasan lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan ekonomi pada tingkat menengah atas. Mengapa pendidikan ekonomi? Karena sebenarnya kerusakan lingkungan berkaitan dengan aktivitas atau perilaku manusia dalam *berproduksi, berkonsumsi dan berdistribusi* (Prugh, 1995: xvii) yang tidak lain merupakan obyek kajian ilmu ekonomi. Pendidikan Ekonomi berkelanjutan sebagai salah satu wujud pendidikan masa depan juga perlu diwujudkan pada semua jenjang lembaga pendidikan formal, di sekolah, termasuk di SMA (Wahjoedi, 1997; 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas, seluruh tahapan penelitian ini diharapkan akan menghasilkan solusi strategis untuk mengubah perilaku berproduksi dan berkonsumsi serta distribusi masyarakat, yakni dengan melalui pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan (Fien & Fien, 1996: 200). Pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan selanjutnya ditulis dengan istilah “pendidikan ekonomi berkelanjutan” (*sustainable economics education*) pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan penelitian tahap awal ini akan dapat dirumuskan suatu model pembelajaran ekonomi berkelanjutan dengan model pembelajaran inovatif di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada tahap awal penelitian diharapkan akan dapat digali banyak informasi tentang apakah pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan telah diterapkan di SMA. Semua informasi digunakan sebagai dasar pengembangan model pembelajaran ekonomi berkelanjutan untuk SMA yang inovatif.

## METODE

Tahapan penelitian awal sebagai tahap eksplorasi ini meliputi enam kegiatan. Pertama, kajian kurikulum pendidikan ekonomi SMA: apakah telah ada muatan wawasan lingkungan/berkelanjutan. Kedua, kajian guru-guru pendidikan ekonomi SMA: apakah mereka telah mengintegrasikan wawasan lingkungan/berkelanjutan dalam materi pembelajarannya. Ketiga, kajian implementasi proses pembelajaran pendidikan ekonomi berkelanjutan. Keempat, kajian isi bahan ajar: apakah telah ada muatan berwawasan lingkungan/berkelanjutan. Kelima, kajian penataan suasana sekolah: apakah telah mendukung pembelajaran ekonomi berkelanjutan. Keenam, kajian kebutuhan yang perlu segera diwujudkan untuk mendukung proses pembelajaran pendidikan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis data dapat ditemukan berbagai informasi sebagai dasar perancangan model pembelajaran ekonomi berkelanjutan.

Penelitian eksploratif tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan ekonomi berkelanjutan ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur secara langsung kepada guru ekonomi SMA yang berada di 3 kota wilayah Jawa Timur, yaitu Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Melengkapi eksplorasi data dilakukan penyebaran angket kepada guru-guru ekonomi peserta PLPG yang dilakukan oleh UM yang mewakili wilayah Jawa Timur bagian Selatan dan peserta PLPG oleh UNESA yang mewakili wilayah Jawa Timur bagian utara.

Responden guru pendidikan ekonomi SMA dari 3 (tiga) kota di provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mewakili karakteristik yang berbeda, yakni Tulungagung sebagai representasi masyarakat agraris (SMAN Ngunut, SMAN Rejotangan, SMA PGRI 1, dan SMA St. Thomas A.), Tuban sebagai representasi masyarakat pesisir/pantai (SMAN 1, SMAN 3, SMA Mambaul Futuh, dan SMA PGRI 1), dan Sidoarjo sebagai cerminan masyarakat industri (SMAN 1, SMAN 3, SMA Untung Suropati, dan SMA Antartika). Jumlah guru yang diwawancarai sebanyak 34 guru ekonomi kelas X, XI dan XII, dengan rincian dari Tulungagung 12 orang, Tuban 10 orang, dan Sidoarjo 12 orang.

Jumlah responden guru ekonomi SMA yang mengisi angket tentang implementasi pendidikan ekonomi berkelanjutan sebanyak 69 orang, terdiri dari 44 orang guru peserta PLPG di UM Malang dan sebanyak 25 orang guru peserta PLPG pendidikan ekonomi di UNESA Surabaya. Guru-guru SMA yang terlibat pada kegiatan PLPG di dua perguruan tinggi

tersebut berasal dari kota Pasuruan, Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan (mewakili wilayah Jawa Timur Selatan), serta dari kota Surabaya, Gresik, Madura, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban yang mewakili wilayah Jawa Timur bagian Utara.

Data yang telah dikumpulkan dan ditabulasi kemudian dianalisis secara deskriptif, dan kemudian disajikan secara kuantitatif berupa angka-angka dan juga secara kualitatif berupa narasi deskriptif. Data hasil temuan inilah yang kemudian akan dijadikan dasar untuk pengembangan model pembelajaran pendidikan ekonomi berkelanjutan di SMA pada tahap penelitian tahun kedua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Secara umum potret pembelajaran pendidikan ekonomi berkelanjutan di SMA masih belum ada wujud implementasi secara mapan. Kondisi tersebut dapat tergambarkan pada muatan isi kurikulumnya, kesiapan guru, keberadaan bahan ajar, proses pembelajaran, dan penataan suasana sekolahnya. Namun demikian sebenarnya, para guru sangat setuju dan siap untuk mengimplementasikan, siap mengikuti diklat implementasi pembelajaran, setuju mengubah isi kurikulum, dan memerlukan buku bahan ajar yang mendukung terwujudnya pendidikan ekonomi SMA yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan. Kesimpulan umum tersebut dapat didasarkan pada hasil pengumpulan data di beberapa kota di Jawa Timur.

Secara khusus, gambaran wilayah Tulungagung menunjukkan hal-hal berikut. Semua (100%) guru merasa pernah menerapkan wawasan lingkungan/berkelanjutan pada pembelajaran pendidikan ekonomi SMA namun tidak nyata terprogram secara formal. Sebagian besar (53%) guru menyatakan bahwa wawasan lingkungan/berkelanjutan belum dituangkan dalam kurikulum, dan sebagian (47%) lainnya menyatakan sudah tertuang namun tidak secara eksplisit. Semua (100%) guru menyatakan bahwa belum ada bahan ajar yang secara eksplisit memuat pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan. Hampir semua (86%) guru merasa perlu dan setuju untuk segera mengimplementasikan pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan tetapi perlu terlebih dulu dilakukan pelatihan serta dukungan adanya buku ajarnya. Sebagian besar (86%) guru menyarankan untuk segera mewujudkan perubahan kurikulum pendidikan ekonomi dengan memasukkan muatan karakter wawasan lingkungan/berkelanjutan.

Dari wilayah Tuban, 78% guru menyatakan telah menerapkan wawasan lingkungan/berkelanjutan pada pendidikan ekonomi, namun tidak terprogram secara baik dan nyata; 100% guru menyatakan bahwa wawasan lingkungan/berkelanjutan belum tertuang secara nyata di dalam kurikulum formal yang berlaku; 89% guru menyatakan perlunya pengadaan buku ajar pendidikan ekonomi bermuatan wawasan lingkungan/berkelanjutan, karena selama ini belum tersedia buku yang bermuatan wawasan lingkungan/berkelanjutan; 100% guru menyatakan setuju jika wawasan lingkungan/berkelanjutan diintegrasikan ke dalam pendidikan ekonomi dan menyarankan perlunya dilakukan pelatihan dan dukungan adanya buku ajar; dan 33,3% guru menghendaki perubahan kurikulum pendidikan ekonomi dengan memberi muatan karakter wawasan lingkungan/berkelanjutan.

Dari wilayah Sidoarjo, 100% guru menyatakan belum menerapkan wawasan lingkungan/berkelanjutan dalam pendidikan ekonomi, secara terprogram dan terencana dengan baik; 66,67% guru menyatakan bahwa wawasan lingkungan/berkelanjutan sudah tertuang dalam kurikulum, namun belum secara nyata terprogram dan terencana secara formal; 100% guru menyatakan perlunya pengadaan buku pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan, karena buku-buku ekonomi yang ada tidak memiliki muatan wawasan lingkungan/berkelanjutan; 100% guru siap mengimplementasikan muatan wawasan lingkungan/berkelanjutan sebagai bagian dari materi pendidikan ekonomi dan menyarankan perlu segera dilakukan pelatihan; 55,60% menginginkan adanya buku pendidikan ekonomi yang bermuatan karakter wawasan lingkungan/berkelanjutan; dan 100% guru menghendaki perubahan kurikulum pendidikan ekonomi dengan memasukkan muatan karakter wawasan lingkungan/berkelanjutan.

Gambaran umum tentang pandangan guru ekonomi SMA mengenai pelaksanaan pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan di wilayah kota-kota di daerah Jawa Timur bagian selatan dan bagian utara, dapat diungkap melalui 2 (dua) kegiatan PLPG Universitas Negeri Malang di Malang dan Universitas Negeri Surabaya di Surabaya. Respon peserta PLPG menunjukkan bahwa 55% peserta PLPG di Malang dan 98% peserta PLPG di Surabaya menilai pendidikan ekonomi berkelanjutan tidak terprogram dan terencana secara formal; 80% peserta PLPG Malang dan 55% peserta PLPG Surabaya menyatakan bahwa Pendidikan Ekonomi Berkelanjutan belum dituangkan dalam kurikulum. Semua (100%) peserta PLPG di Malang dan Surabaya menilai pendidikan ekonomi berkelanjutan belum secara eksplisit tertuang dalam bahan ajar. Sebanyak

60% peserta PLPG Malang dan 80% peserta PLPG Surabaya menilai kurangnya kesiapan/kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran inovatif pendidikan ekonomi berkelanjutan. Sebesar 100% peserta PLPG Malang dan 88% peserta PLPG Surabaya menginginkan adanya bahan ajar dan pelatihan implementasi pendidikan ekonomi berkelanjutan. Akhirnya, 60% peserta PLPG Malang dan 80% peserta PLPG Surabaya menginginkan adanya langkah perubahan ke arah kurikulum pendidikan ekonomi berkelanjutan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan di SMA masih belum dalam kondisi yang menggembirakan. Pada umumnya guru merasakan pendidikan ekonomi berkelanjutan belum terimplementasi secara nyata. Kurikulum yang ada tidak terprogram secara formal, belum ada bahan ajar yang secara khusus disiapkan, proses pembelajaran yang tidak inovatif, belum adanya kegiatan diklat khusus tentang pembelajaran inovatif pendidikan ekonomi berkelanjutan, kurikulum tidak pernah disiapkan ke arah pembelajaran ekonomi berkelanjutan.

## Pembahasan

Hasil temuan tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini kurikulum mata pelajaran Ekonomi SMA/MA menurut KTSP 2006 tidak memuat aspek lingkungan hidup sebagai bentuk pembelajaran ekonomi berkelanjutan. Kenyataan ini tidak sejalan dengan gerakan dunia sebagaimana dirumuskan dalam *an education program for sustainability* oleh UNESCO sejak dekade 1970-an dan telah diimplementasikan oleh banyak negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah memasukkan program “keberlanjutan” dalam kurikulum arsitektur bagi pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab global (Wright, 2003). Demikian pula, sebagai wujud tanggung jawab global, pemerintah India telah melakukan inovasi kurikulum bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan (Chhokar, 2010). Bahkan beberapa negara telah melakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kurikulum berorientasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dunia. Contohnya, suatu lembaga di Inggris, *Sustainable Development Education Liaison Group* (SDELG), menghasilkan laporan berjudul *A Curriculum for Excellence* sebagai rumusan terbaru kurikulum pembangunan berkelanjutan (SDELG, 2006). Hal seperti ini juga dilakukan oleh pemerintah Australia antara lain dengan menyusun panduan pengembangan kurikulum pembangunan berkelanjutan dalam suatu buku (Australian Government, 2010).

Realitas bahwa kurikulum KTSP 2006 tidak memuat pembelajaran ekonomi berkelanjutan mencerminkan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh mendukung upaya pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs), yakni agenda lingkungan berkelanjutan (*sustainability of environment*). Kenyataan tersebut juga menggambarkan bahwa Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010, Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010) tidak diimplementasikan lebih lanjut secara formal dalam kurikulum pembelajaran ekonomi.

Oleh karena itu wajar apabila temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para guru menghendaki aspek lingkungan diintegrasikan ke dalam pendidikan ekonomi berkelanjutan; dan perlunya pelatihan serta dukungan buku-ajar dapat diartikan secara implisit bahwa para guru melihat adanya entusiasme, paling tidak keinginan para peserta didik memperoleh pengetahuan tentang keberlanjutan (*sustainability*). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Turki yang menunjukkan bahwa para siswa SMA di Turki menganggap perlu pendidikan pembangunan berkelanjutan demi masa depan mereka (Incekara & Tuna, 2011: 27). Para peserta didik di Jepang juga menyadari akan perlunya pembelajaran masalah lingkungan demi terwujudnya masyarakat berkelanjutan (Ono dkk., 2011:9). Penelitian tentang masalah pendidikan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia pun telah dilakukan oleh Winarno pada 1994-1996 (Winarno, 1997) melalui Riset Unggulan Terpadu (RUT) dengan fokus untuk pembelajaran di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) yang telah menghasilkan buku pembelajaran pendidikan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan sampai sebanyak 22 seri.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, kurikulum pendidikan ekonomi pada SMA/MA KTSP 2006 tidak memberikan muatan wawasan lingkungan/berkelanjutan, padahal perekonomian masyarakat meliputi aktivitas konsumsi, produksi, dan distribusi yang berhubungan langsung dengan lingkungan. *Kedua*, pada

umumnya para guru pengampu mata pelajaran ekonomi berhasrat memberikan muatan wawasan lingkungan namun merasa ragu karena (a) kurikulum nasional KTSP 2006 tidak memberikan panduan sedikitpun tentang pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan, (b) tidak ada buku ajar ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan sebagai bahan ajar atau rujukan, dan (c) mereka tidak memiliki kompetensi formal tentang ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan karena tidak pernah mempelajari dan tidak memperoleh pendidikan tentang hal itu. Sebagai implikasi dari kondisi tersebut adalah pemerintah seharusnya segera melakukan perubahan terhadap kurikulum SMA/MA khususnya mata pelajaran ekonomi dengan memasukkan muatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), karena pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk tanggung jawab global setiap negara demi kelangsungan masa depan dunia. Di samping itu, temuan dan pembahasan tersebut memperkuat alasan pentingnya dilakukan pengembangan model pembelajaran inovatif untuk pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi. Perlu segera dibentuk tim pelaksana untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan ekonomi ke arah berwawasan lingkungan/berkelanjutan. Sebagaimana yang disarankan oleh sebagian besar guru pendidikan ekonomi, agar segera disediakan buku ajar pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan bagi SMA/MA. Buku ajar ini diharapkan sebagai kelanjutan dari buku pendidikan lingkungan bagi SD dan SMP yang dihasilkan oleh Tim Peneliti Riset Unggulan Terpadu Universitas Negeri Malang tahun 1997. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan/berkelanjutan, perlu dilakukan pelatihan peningkatan pembelajaran inovatif. Untuk mewujudkan silabus pembelajaran ekonomi berkelanjutan perlu disusun rancangan materi silabus dengan memasukkan berbagai muatan wawasan pembangunan berkelanjutan dari segala aspek. Untuk menghasilkan bahan ajar pendidikan ekonomi berkelanjutan, perlu disusun rancangan isi materi bahan ajar yang dapat mengacu pada pemikiran anatomi ilmu ekonomi berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

Australian Government. 2010. *Sustainability Curriculum Framework: A Guide for Curriculum Developers and Policy Makers*. Canberra: Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, (Online),

(<http://www.environment.gov.au/education/publications/curriculum-framework.html>), diakses 17 April 2011.

- Chhokar, K.B. 2010. Higher Education and Curriculum Innovation for Sustainable Development in India. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 11 (2): 141-152.
- Djajadiningrat, S.T., Hendriani, Y., & Famiola, M. 2011. *Ekonomi Hijau (Green Economy)*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sain.
- Energy Saving Trust. 2007. *The Role of Education and Schools in Shaping Energy-related Consumer Behaviour*. London: the Church Montly Office.
- Field, C.B. 1997. *Environmental Economics. An Introduction*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Fien, J. & Fien, J.W. 2009. Environmental Education. Dalam Rob Gilbert (Ed), *Studying Society and Environment. A Handbook for Teachers* (hlm. 200-216). South Melbourne: McMillan Education Australia PTY LTD
- Incekara, S. & Tuna, F. 2011. Attitudes of Secondary School Students Towards Environmental and Sustainable Development Issues: A Case Study from Turkey. *African Journal of Biotechnology*, 10 (1): 21-27.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH.02.2010 dan Nomor: 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kompas. 13 Februari, 2010. *Harimau (Panthera): Riwayatmu Kini*, hlm.15.
- Ono, Y., Habu, M., Mohri, S., & Yamamoto, H. 2011. *A Collaborative Activity for Curriculum Development of High School in Okayama among Okayama University, a High School and Stakeholders at Local Communities: From the Perspective of Challenging Un-Sustainability Issues at Local Communities*, Okayama: Okayama University, (Online), (<http://esd.okayama-u.ac.jp/achievements/pdf/HabuPaper.pdf>) diakses 17 April 2011.
- Prugh, T. 1995. *Natural Capital And Human Economic Survival*, International Society for Ecological Economics. USA: Solomon, MD.
- Pugel, A.T. & Lindert, P.H. 2000. *International Economics*. New York: Irwin-McGraw-Hill
- Salim, E. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- SDELG. 2006. *Discussion Paper : Sustainable Development Education in A Curriculum for Excellence*, (Online), (<http://www.scwg.aaps.ed.ac.uk/docs/open/SDELG.pdf>), diakses 15 Mare 2011.
- Soerjani, M. 2000. *Kepedulian Masa Depan*. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
- Sulistyo, B., Perdanakusuma, J., & Leksono, N. 2010. *MDGs (Millennium Development Goals) Sebentar Lagi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wahjoedi. 1997. *Integrasi Pendidikan Lingkungan ke dalam Pembelajaran Ekonomi: Bahan Ajar Untuk SMP*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Wahjoedi. 2007. *Kekinian Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dalam Menghadapi Tuntutan dan Tantangan Jaman*. Makalah disajikan dalam seminar nasional di PPs Universitas Negeri Malang, 2 Pebruari.
- Wardhana, W.A. 2010. *Dampak Pemanasan Global*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Winarno, R. 1997. *Pengembangan Pendidikan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan: Riset Unggulan Terpadu (1994-1996)*. Jakarta: Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Wright, J. 2003. Introducing Sustainability into the Architecture Curriculum in the United States. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 4 (2): 100-105.